



GEMA PERENCANA

Volume 1, Nomor 3, Januari - April 2023
Halaman 137 - 310

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK -----	i -vi
EFEKTIVITAS TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA	
Ervy Alinda Lubis -----	137 - 160
PERENCANAAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM MENGKAMPANYEKAN PESAN KERUKUNAN PADA TELEVISI	
I Putu Putra Yasa -----	161 - 178
DEGRADASI <i>STUNTING</i> MELALUI KONVERGENSI BERBASIS KANTOR URUSAN AGAMA DI PROVINSI LAMPUNG	
Fidelia Kirana -----	179 - 192
SIPPA SEBAGAI PELAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	
Abdul Syukur -----	193 - 202
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM ANALISIS STRATEGI YANG MEMUNGKINKAN BAGI PENYELENGGARAAN HAJI RAMAH LINGKUNGAN	
Azizah Hanim Nasution -----	203 - 220
PENGUATAN KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI; ANALISIS INDEKS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	
Reni Andriyani -----	221 - 232

ANALISIS MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PONTIANAK BARAT)	
Gusti Hijrah Syahputra -----	233 - 250
DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN “KEMENAG SULTRA BERSAHABAT” TERHADAP PENCIPTAAN KONDISI DAMAI	
Rahmad -----	251 - 274
ANALISA PERENCANAAN BERBASIS SNPT TERHADAP PENERAPAN <i>PERFORMANCE BASED PLANNING</i>	
Tato Priyo Sulistiyono -----	275 - 296
DEGRADASI LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI SULAWESI TENGGARA	
Nasrullah Sulaiman -----	297 - 310

SALAM REDAKSI

Pembaca Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA yang terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa-Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayat-Nya, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** ini dapat terbit kembali sebagai Edisi Lanjutan, yaitu: **Volume 1 Nomor 3, Januari-April 2023** setelah mendapatkan E-ISSN (*Electronic -International Standard Serial Number*) dari Pusat Nasional ISSN Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Jurnal ini dalam pengelolaannya menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA. Kami berharap, pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih cepat, lebih efektif, dan lebih luas melalui media *online*. Di samping itu, Jurnal ini tetap dicetak secara *hardcopy*, walaupun dengan jumlah halaman dan tiras yang terbatas.

Pada **Volume 1 Nomor 3, Januari-April 2023** ini, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** menerbitkan 10 (sepuluh) artikel, yang kesemuanya berasal dari para Perencana di lingkungan Kementerian Agama RI. Keduabelas artikel tersebut tersaji sesuai dengan ruang lingkup (*scope and focus*) yang telah ditetapkan Tim Editorial **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA**, di mana bahasan terkait dalam bidang: Sosial, Ekonomi, Spasial, dan Pendidikan, dalam perspektif Agama dan Keagamaan.

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan pembangunan di bidang agama dan Pendidikan keagamaan maupun pengembangan pengetahuan di bidang kegiatan masyarakat.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2023
Dewan Redaksi



LEMBAR ABSTRAK

Ervy Alinda Lubis

Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Email: erviealind@gmail.com

INGGRIS

EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF STATE PROPERTY ASSET (BMN) IN THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

This article describes the complexity of issues related to management of State Property Asset (BMN) at the Ministry of Religious Affairs is a crucial problem that has an impact on the achievement of strategic objectives to improve the quality of governance in the field. Explicitly, ineffectiveness of BMN management is related to disorganized administration, physical inventory and legality aspects which are reflected in the results of evaluation, strategic plan and evaluation of implementation of bureaucratic reform of the Ministry of Religious Affairs. This research aims to produce recommendations for optimizing BMN governance policies within the Ministry of Religious Affairs. A mixed method approach was used with three data collection techniques, namely document studies, interviews related to governance mechanisms, and a survey with purposive sampling of 830 respondents from the Ministry of Religious Affairs employee. The results of study stated that the value effectiveness of BMN governance was simultaneously less effective with a score of 3.36 (poor) on a scale of 1-5 with a minimum effective category passing grade of obtaining a score of 3.41 (Good). Five indicators that serve as parameters for effectiveness of BMN management, two indicators are cause BMN management to be less effective, namely aspects of supervision and integrity with a score of 3.11 and effectiveness of application support in BMN management with a score of 3.33. The other three aspects have been running effectively, namely transparency (3.44), specifications procurement use of goods (3.44) and capacity of BMN managers (3.52).

Keywords: Effectiveness, Management, State Property Assets (BMN), Ministry of Religious Affairs

INDONESIA

EFEKTIVITAS TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Artikel ini menguraikan kompleksitas permasalahan terkait tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama menjadi problem krusial, yang berdampak pada capaian sasaran strategis peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara eksplisit, kurang efektifnya kinerja tata kelola BMN terkait karena belum tertibnya administrasi, inventarisasi fisik, dan aspek legalitas yang tergambar dalam hasil evaluasi rencana strategis dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama. Riset ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi optimalisasi kebijakan tata kelola BMN di lingkungan Kementerian Agama. Pendekatan *mixed method* digunakan dengan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen terkait regulasi BMN, wawancara terkait mekanisme tata kelola, dan survei dengan sampling *purposive* terhadap 830 responden pegawai Kementerian Agama. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai efektivitas tata kelola BMN secara simultan kurang efektif dengan perolehan skor 3,36 (kurang baik) dari skala 1-5 dengan *passing grade* kategori efektif minimal memperoleh skor 3,41 (Baik). Dari 5 (lima) indikator yang menjadi parameter efektivitas pengelolaan BMN, 2 (dua) indikator masih menyebabkan tata kelola BMN menjadi kurang efektif, yaitu: aspek pengawasan dan integritas dengan skor 3,11 dan efektivitas dukungan Informasi dan Teknologi (IT) dalam pengelolaan BMN dengan perolehan skor 3,33. Adapun 3 (tiga) aspek lainnya sudah berjalan efektif, yaitu transparansi (3,44), spesifikasi pengadaan dan penggunaan barang (3,44), serta kapasitas pengelola BMN (3,52).

Kata Kunci : Efektivitas, Tata Kelola, Aset Barang Milik Negara, Kementerian Agama

I Putu Putra Yasa

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan

Email: putra@Kemenag.go.id

INGGRIS

PLANNING COOPERATION WITH BROADCASTING INSTITUTIONS IN CAMPAIGNING THE MESSAGE OF HARMONY ON TELEVISION

This article describes the issue of maintaining harmony as a top priority, because harmony is the authorized capital in nation building. The Ministry of Religious Affairs in Tabanan District is obliged to campaign for harmony. Harmony campaign is through the display of public service advertisements on television. The policy in the form of automatic adjustment is an obstacle in achieving performance targets. The achievement must not stop. Instead, solutions must be found so that targets are still achieved. Cross-sectoral cooperation between the Ministry of Religious Affairs and broadcasting institutions is a necessity. Therefore planning is carried out that is intended to provide information as a basis for policy making of harmony campaigns. The goals are: (1) Planning the achievement of several performance targets in one cooperative activity by displaying the public service advertisements on television; (2) Streamlining cost expenditures through the display of public service advertisements on television with a cooperation scheme between the government and business entities; (3) Streamlining the delivery of a harmony message with the target of people who actively access television. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data are collected from various literature sources and analyzed the external factors to see the challenges and potentials that exist. Based on the analysis, the recommended policy choice is cooperation between the Ministry of Religious Affairs in Tabanan District and the Public Broadcasting Institution to convey harmony through public service advertisements on television.

Keywords: Planning, Cooperation, Harmony, Television

INDONESIA

PERENCANAAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM MENGKAMPANYEKAN PESAN KERUKUNAN PADA TELEVISI

Artikel ini menguraikan masalah pemeliharaan kerukunan sebagai prioritas utama, karena kerukunan menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Kementerian Agama Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk mengkampanyekan kerukunan di masyarakat. Salah satu upaya kampanye kerukunan adalah melalui penayangan iklan layanan masyarakat pada televisi. Adanya kebijakan anggaran berupa *automatic adjustment* menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian target kinerja tidak boleh berhenti, justru harus dicarikan solusi agar target kinerja tetap tercapai. Kerja sama lintas sektoral antara Kementerian Agama Kabupaten Tabanan dengan Lembaga Penyiaran merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu dilakukan perencanaan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi sebagai landasan pengambilan kebijakan kampanye kerukunan melalui televisi. Tujuannya: (1) Merencanakan pencapaian beberapa target kinerja dalam satu aktivitas kerja sama penayangan iklan layanan masyarakat pada televisi; (2) Mengefisienkan pengeluaran biaya melalui penayangan iklan layanan masyarakat pada media televisi dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; (3) Mengefektifkan penyampaian pesan kerukunan dengan sasaran masyarakat yang aktif mengakses media konvensional televisi. Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan dilakukan analisis terhadap faktor eksternal untuk melihat tantangan dan potensi yang ada. Berdasarkan analisis, maka pilihan kebijakan yang direkomendasikan adalah kerja sama antara Kementerian Agama Kabupaten Tabanan dengan Lembaga Penyiaran Publik untuk menyampaikan kerukunan melalui iklan layanan masyarakat pada media televisi.

Kata Kunci : Kerja Sama, Kerukunan, Televisi

Fidelia Kirana

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
E-mail: ndoetkumkum@gmail.com

INGGRIS

STUNTING DEGRADATION THROUGH CONVERGENCE BASED ON RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN LAMPUNG PROVINCE

The purpose of this study is to find out how the role of the Ministry of Religious Affairs in Lampung Province in supporting the national program for stunting handling through the optimization of the services of the Office of Religious Affairs (KUA) with several strategic programs to reduce stunting of the Ministry of Religious Affairs. In this study using a qualitative approach through literature studies by collecting several relevant sources of literature obtained. After the literature data is collected, the author compiles and sorts the data and is compiled into new findings or sources of information. As well as the data collection carried out by interview method with several informants such as, Head of the Sakinah Family Sub-Directorate of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Bappeda of Lampung Province, Islamic Religious Affairs of the Provincial Regional Office, and Islamic Bimas Section at several offices of the Ministry of Religious Affairs of Kota Regency. The results of this study research show that the Ministry of Religious Affairs through the KUA Service in the implementation of its program has not been so optimal that it requires convergence of each stunting reduction program in Lampung Province implementation so that it can meet and help achieve the National target for stunting reduction in 2024 by 14%.

Keywords: *Stunting, KUA, Convergen*

INDONESIA

DEGRADASI STUNTING MELALUI KONVERGENSI BERBASIS KANTOR URUSAN AGAMA DI PROVINSI LAMPUNG

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kementerian Agama di Provinsi Lampung dalam mendukung program nasional untuk penanganan *stunting* melalui optimalisasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) dengan beberapa program strategis penurunan *stunting* Kementerian Agama. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa sumber literatur yang diperoleh yang relevan. Setelah data kepustakaan terkumpul, penulis menyusun dan mengurutkan data dan disusun menjadi temuan atau sumber informasi baru. Serta dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara dengan beberapa informan seperti, Kasubdit Keluarga Sakinah Kemenag RI, Bappeda Provinsi Lampung, Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Provinsi, dan Seksi Bimas Islam pada beberapa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Hasil penelitian kajian ini bahwa Kementerian Agama melalui Layanan KUA dalam pelaksanaan program penurunan *stunting* belum begitu optimal sehingga perlu melakukan penguatan jejaring dan sinergitas sekaligus mengkonvergensi program seluruh Kementerian Lembaga terkait serta stake holder lainnya dalam pelaksanaannya, sehingga bisa maksimal dalam pelaksanaan program penanganannya serta memenuhi, dan sekaligus membantu pencapaian target Nasional untuk penurunan *stunting* di tahun 2024 sebesar 14%.

Kata Kunci : *Stunting, KUA, Konvergensi*

Abdul Syukur

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail: aab.smali@gmail.com

INGGRIS

SIPPA AS A REPORTING ON CONTROL AND EVALUATION OF PROGRAM AND BUDGET PLANNING POLICIES

This policy paper aims at developing a Program and Budget Reporting Information System or Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran (SIPPA) as a Reporting on Control and Evaluation of Program and Budget Planning Policies at Badan Litbang and Diklat Kementrian Agama. In collecting information for analysis, the authors conducted discussion and interview methods, studied regulations/laws, and explored sites on the internet. The stages of system development that have been done are, system planning, system requirements analysis, system design, system selection, system implementation and system testing. The results of the research are a web-based Program and Budget Reporting Information System Application or Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran (SIPPA) for Badan Litbang and Diklat Kementrian Agama that can be accessed online. This system will facilitate every level of leadership in reporting, controlling and evaluating Program and Budget Performance Achievements in accordance with their authority, as well as in making program and budget planning policies for the following year.

Keywords: Reporting; Control; Evaluation; Planning

INDONESIA

SIPPA SEBAGAI PELAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Artikel kebijakan ini bertujuan untuk Membangun Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran (SIPPA) sebagai Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Program dan Anggaran pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dalam mengumpulkan informasi untuk menganalisa, penulis melakukan metode diskusi dan wawancara, mempelajari regulasi/peraturan perundangan, dan eksplorasi situs-situs di internet. Tahapan pembangunan sistem yang penulis lakukan, yaitu: perencanaan sistem, analisa kebutuhan sistem, perancangan sistem, seleksi sistem, implementasi sistem dan pengujian sistem. Hasil penelitian berupa Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran (SIPPA) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama berbasis web yang dapat diakses secara *online*. Dengan sistem ini akan memudahkan setiap level pimpinan dalam pelaporan, pengendalian dan evaluasi Capaian Kinerja Program dan Anggaran sesuai dengan kewenangannya, serta dalam pengambilan kebijakan perencanaan program dan anggaran pada tahun berikutnya.

Kata Kunci : Pelaporan; Pengendalian; Evaluasi; Perencanaan

Azizah Hanim Nasution

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

E-mail: adeanasti@gmail.com

INGGRIS

IDENTIFICATION INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS TO ANALYZE PROMISING STRATEGY FOR ENVIRONMENTAL-FRIENDLY HAJJ

This paper is a policy oriented which aimed at establishing policy regarding Environmentally Friendly Hajj (HRL). It is assumed that the Ministry of Religious Affair has not made a policy that is integrated with the HRL, thus no one has initiated any alternative within the Ministry of Religious Affair. Therefore, it is necessary to analyze what factors delay the realization of HRL within the Ministry of Religious Affair; and it is necessary to examine how the Ministry of Religious Affair is committed to the HRL movement. It is also necessary to know how the HRL policy can be followed up by policy makers at the Ministry of Religious Affair. The method used in this studi is qualitative descriptive approach by conducting a literature study to identify factors related to HRL, and then analysed them by using SWOT and Causal Loop Diagrams. It can be concluded that the Ministry of Religious Affair has the potential to develop HRL implementation without too many challenges because it is in line with the implementation of its duties and functions to provide guidance and education to the Pilgrims. The Ministry of Religious Affair is planned to develop human resources to be able to expressing themselves in building a harmonious relationship between God, humans, and their environment. The recommendations offered include: 1) encouraging the issuance of PMA/KMA-level policies or regulations and circulars; 2) intervening in the environmentally friendly Hajj Manasik Module; 3) improving coordination and synchronization between government and non-government agencies as key actors in strengthening shared commitments; and 4) prepare steps for implementing HRL policy.

Keywords: *Friendly Hajj Pilgrimage , SWOT, Causal Loop Diagram*

INDONESIA

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM ANALISIS STRATEGI YANG MEMUNGKINKAN BAGI PENYELENGGARAAN HAJI RAMAH LINGKUNGAN

Artikel ini berorientasi kepada pengambilan keputusan (kebijakan) tentang Haji Ramah Lingkungan (HRL). Permasalahan yang dihadapi adalah Kementerian Agama belum membuat kebijakan yang terintegrasi dengan konsep HRL dan belum ada yang menginisiasi alternatif kebijakan Penyelenggaraan HRL di kalangan Kementerian Agama. Oleh sebab itu, perlu menganalisis faktor apa saja yang menghambat terwujudnya HRL di lingkungan Kementerian Agama; dan perlu diteliti bagaimana agar Kementerian Agama sebagai aktor kunci Penyelenggaraan HRL berkomitmen terhadap gerakan atau program HRL. Perlu juga diketahui bagaimana strategi kebijakan HRL yang dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan di Kementerian Agama. Metode yang digunakan untuk menemukan jawaban permasalahan adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif, dengan melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor terkait HRL, dan kemudian dianalisis menggunakan SWOT dan Causal Loop Diagram. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama berpotensi mengembangkan penyelenggaraan HRL tanpa tantangan yang terlalu berat karena sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan edukasi terhadap jemaah. Kementerian Agama dapat merencanakan pembangunan sumber daya manusia yang mampu mengekspresikan diri dalam membangun hubungan yang harmonis antara Tuhan, manusia, dan lingkungan hidupnya. Rekomendasi yang ditawarkan antara lain: 1) mendorong diterbitkannya kebijakan atau regulasi setingkat PMA/KMA dan Surat Edaran; 2) mengintervensi modul manasik haji berwawasan lingkungan; 3) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah sebagai aktor kunci dalam mengukuhkan komitmen bersama; serta 4) mempersiapkan langkah-langkah implementasi kebijakan HRL.

Kata Kunci : *Kementerian Agama, Haji Ramah Lingkungan, SWOT, Causal Loop Diagram*

Reni Andriyani

Kementerian Agama Kabupaten Sidrap
E-mail: andriyani.reni88@gmail.com

INGGRIS

POLICY STRENGTHENING OF PROFESSIONAL ZAKAT; ANALYSIS OF CIVIL SERVANT PERCEPTION INDEX AT THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY

This paper describes about professional zakat is one of zakat mal and is a very potential of zakat in building of economy. The implementation of professional zakat payment by civil servant of ministry of Islamic Religion of Sidenreng Rappang is still not optimal, as known it about 25.66%. The purpose of this study was to determine the perception index of professional zakat payments for civil servants at the Ministry of Religious Affairs of Sidrap Regency and to formulate strengthening policies for professional zakat management. This research method uses a descriptive quantitative approach. The data was obtained using a questionnaire and the data was processed with the help of the SPSS for Windows application version 22.0, namely by processing descriptive analysis data. The research instrument was made based on a Likert scale which was made based on indicators of perception variables namely Attitudes, Motives, Interests, Past Experiences and Expectations which were developed by themselves. The number of respondents was 137 people. The questionnaire was distributed through the help of Google form. The results showed that the index of perceptions of zakat payments for the civil servant profession of the Ministry of Religious Affairs of Sidrap Regency was known to be 69.197% or included in the high category. These findings form the basis for strengthening the professional zakat payment policy for civil servants at the Ministry of Religious Affairs of Sidenreng Rappang Regency. The strengthening referred to is through a Circular Letter which regulates the obligation to pay professional zakat and the creation of a Professional Zakat Card (KIZi).

Keywords: Policy Strengthening, Professional Zakat, Perception Index

INDONESIA

PENGUATAN KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI; ANALISIS INDEKS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Artikel ini menguraikan masalah zakat profesi yang merupakan salah satu jenis zakat mal dan menjadi salah satu sumber zakat yang sangat potensial dalam membangun perekonomian umat. Pelaksanaan pembayaran zakat profesi oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang beragama Islam masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase zakat profesi yang dapat ditarik hanya sebesar 25,66%. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui indeks persepsi pembayaran zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dan merumuskan penguatan kebijakan pengelolaan zakat profesi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data diperoleh menggunakan angket dan diolah dengan bantuan aplikasi SPSS for Windows versi 22.0, yaitu dengan pengolahan data analisis deskriptif. Instrumen penelitian dibuat berdasarkan skala Likert yang dibuat berdasarkan indikator variabel persepsi, yaitu Sikap, Motivasi, Kepentingan, Pengalaman Masa Lalu dan Pengharapan yang dikembangkan sendiri. Jumlah responden sebanyak 137 orang. Angket disebar melalui bantuan *google form*. Hasil penelitian menunjukkan, indeks persepsi pembayaran zakat profesi PNS Kementerian Agama Kabupaten Sidrap diketahui sebesar 69.197% atau termasuk kategori tinggi. Temuan ini menjadi dasar melakukan penguatan kebijakan pembayaran zakat profesi bagi PNS di Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Penguatan yang dimaksud melalui Surat Edaran yang mengatur kewajiban pembayaran zakat profesi dan pembuatan Kartu Induk Zakat Profesi (KIZi).

Kata Kunci : Penguatan Kebijakan, Zakat Profesi, Indeks Persepsi

Gusti Hijrah Syahputra

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
E-mail: kalbar_03@yahoo.com

INGGRIS

THE ANALYSIS OF PREWEDDING GUIDANCE PROGRAM TO ACHIEVE SAKINAH FAMILY IN ORDER TO BUILD NATIONALITY CHARACTER (CASE STUDY'S AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS OF WEST PONTIANAK DISTRICT)

This paper describes about the effectiveness of premarital marriage guidance can be seen from: 1) formulation of the guidance objectives, 2) the quality of the guidance process, 3) the level of readiness for marriage after following the guidance. Subjects in the study, out of 60 prospective brides, 40 prospective brides were taken as research samples who had taken premarital marriage guidance Batch I of 2020 at the Office of Religious Affairs of West Pontianak District, Pontianak City. Data collection techniques used in research is by using questionnaires / questionnaires. The results of this study found: 1) the guidance of the bride and timeliness resulted in an accuracy rate of 18.23%. This implies that the purpose of premarital guidance has a compatibility level that has less good relevance compared to the bride/groom's actual information needs; 2) the guidance process produces a quality level value of 70%.

Keywords: *Marriage Guidance, the Sub-District Office of Religious Affairs (KUA), Ministry of Religious*

INDONESIA

ANALISIS MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PONTIANAK BARAT)

Artikel ini menguraikan tentang efektivitas bimbingan perkawinan dilihat dari: 1) perumusan tujuan bimbingan, 2) bagaimana kualitas proses bimbingan, 3) sejauhmana kesiapan menikah setelah mengikuti bimbingan. Subjek pada penelitian, dari 60 calon pengantin diambil sampel penelitian sebanyak 40 calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah Angkatan I Tahun 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan angket/kuesioner. Hasil penelitian ini menemukan: 1) bimbingan calon pengantin menghasilkan tingkat ketepatan waktu dan proses pelaksanaan sebesar 18,23%. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan bimbingan pranikah mempunyai tingkat kecocokan yang kurang memiliki relevansi baik jika dibanding dengan kebutuhan informasi aktual Calon; 2) proses bimbingan menghasilkan nilai tingkat kualitas sebesar 70%.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan; Kantor Urusan Agama (KUA); Kementerian Agama

Rahmad

Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara
E-mail: rahmadlibyah@gmail.com

INGGRIS

IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF THE “FRIENDLY SULTRA THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS” POLICY ON THE CREATING OF PEACEFUL CONDITIONS

This article describes about the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Southeast Sulawesi Province initiated a brilliant movement, namely the “Friendly Southeast Sulawesi the Ministry of Religious Affairs Movement”, an initiative from the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Southeast Sulawesi Province to strengthen and accelerate the implementation of a culture of clean, religious, polite, harmonious life based on technology. This movement is a spontaneous form of responsiveness from the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Southeast Sulawesi to the programs of the Indonesian the Ministry of Religious Affairs and the Southeast Sulawesi Provincial Government Program. The concept of the Friendly Southeast Sulawesi the Ministry of Religious Affairs movement is more implementable and applicable because it was initiated in order to describe the vision, mission and flagship program of the Indonesian the Ministry of Religious Affairs in order to create a pious, moderate, intelligent and superior society and outlines the flagship program of the Southeast Sulawesi Provincial Government, Garbarata through five main pillars, namely Smart Southeast Sulawesi, Healthy Southeast Sulawesi, Concerned Poverty Southeast Sulawesi, Cultured and Faithful Southeast Sulawesi and Productive Southeast Sulawesi, according to the tasks and functions carried out by the Ministry of Religious Affairs. This paper synergizes the Friendly Southeast Sulawesi the Ministry of Religious Affairs Movement. What is the role of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in implementing this movement in the socio-economic life of the community, and how does it affect the creation of a peaceful harmonious life within frame (Together, United, Brothers).

Keywords: *The Ministry of Religious Affairs of Southeast Sulawesi, Friendly, Peaceful Conditions*

INDONESIA

DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN “KEMENAG SULTRA BERSAHABAT” TERHADAP PENCIPTAAN KONDISI DAMAI

Artikel ini menguraikan tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menggagas suatu gerakan yang cemerlang yaitu “Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat”, sebuah ikhtiar dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dan mempercepat implementasi budaya hidup yang bersih, religius, santun, harmonis berbasis teknologi. Gerakan ini sebagai bentuk responsifitas yang bersifat spontan dari Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara terhadap program Kementerian Agama RI dan Program Pemerintah Provinsi Sultra. Konsep gerakan Kemenag Sultra Bersahabat ini lebih implementatif dan aplikatif karena digagas dalam rangka menjabarkan visi, misi dan program unggulan Kemenag RI dalam rangka mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul serta menjabarkan program unggulan Pemerintah Provinsi Sultra, Garbarata melalui lima pilar utama, yaitu Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Berbudaya dan Beriman serta Sultra Produktif, sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Dalam tulisan ini mensinergikan Gerakan Kemenag Sultra Bersahabat. Bagaimana peranan Kanwil Kementerian Agama dalam mengimplementasi gerakan tersebut di kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta bagaimana pengaruhnya pada penciptaan kehidupan yang harmonis yang damai dalam bingkai 3-B (Bersama Bersatu, Bersaudara).

Kata Kunci : Kemenag Sultra, Bersahabat, Kondisi Damai

Tato Priyo Sulistiyono
UIN Raden Mas Said Surakarta
E-mail: tattopst@staff.uinsaid.ac.id

INGGRIS

ANALYSIS OF SNPT-BASED PLANNING ON THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED PLANNING

This paper describes about financial planning policy based on university national standards in UIN Raden Mas Said Surakarta this research implements qualitative. The data collected from documents related planning based on university national standards in UIN Raden Mas Said Surakarta. The result shows that planning policy based on university national standards in UIN Raden Mas Said based are financial planning by involving quality assurance institution and internal surveillance institution. University quality assurance body is the institution that responsible to accreditation of university and department. University internal surveillance is the institution that responsible for conducting and controlling the financial budgeting. All of them collaborate with financial planning body in UIN Raden Mas Said Surakarta. To improve in the future, the authors recommend 4 areas of improvement: reviewing strategic planning so that it can accommodate accreditation criteria, changing planning patterns to decentralization, involving study program management units and quality control groups in planning and budgeting, and conducting regular evaluations.

Keywords: *University Budgeting; Accreditation; UIN Raden Mas Said Surakarta; Planning; University Quality Assurance*

INDONESIA

ANALISA PERENCANAAN BERBASIS SNPT TERHADAP PENERAPAN PERFORMANCE BASED PLANNING

Artikel ini menguraikan tentang kebijakan perencanaan berbasis standar nasional perguruan tinggi di UIN Raden Mas Said Surakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dan data diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen terkait dengan model perencanaan berbasis standar nasional perguruan tinggi di UIN Raden Mas Said Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan berbasis standar nasional perguruan tinggi di UIN Raden Mas Said Surakarta meliputi pola penyusunan perencanaan dan anggaran dengan keterlibatan lembaga penjaminan mutu sebagai unit kerja yang membidangi pelaksanaan akreditasi dan satuan pengawas internal yang membidangi pelaksanaan anggaran sehingga akan terbentuk sinergi tiga bidang dalam penyusunan perencanaan dan anggaran. Dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang. Penulis merekomendasikan 4 area penyempurnaan, yaitu: review Rensta Kementerian Agama agar dapat mengakomodir kriteria akreditasi, perubahan pola perencanaan menjadi desentralisasi, melibatkan unit pengelola program studi dan gugus kendali mutu dalam penyusunan perencanaan dan anggaran serta melakukan evaluasi secara berkala.

Kata Kunci : Penganggaran Perguruan Tinggi; Akreditasi; UIN Raden Mas Said Surakarta; Perencanaan; Penjaminan Mutu

Nasrullah Sulaiman

Institut Agama Islam Negeri Kendari
E-mail: nasrullahsulaiman83@gmail.com

INGGRIS

ENVIRONMENT DEGRADATION AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN SOUTHEAST SULAWESI

This article describes about ensure sustainable economic development in Southeast Sulawesi, environmental degradation should not increase over time and, ideally, should decrease. The mining industry is the second largest contributor to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Southeast Sulawesi. However, environmental degradation also occurs due to mining activities in some areas. The literature review in this study suggests that the government needs to take policy measures to address environmental degradation caused by mining activities in several areas of Southeast Sulawesi. Reclamation of former mining areas is an appropriate policy that can be implemented by the government to address environmental degradation resulting from mining activities without regard to proper mining processes, thereby minimising the impact of environmental degradation that can harm communities and damage the environment.

Keywords: *Environment Degradation, Sustainable Development, Mining*

INDONESIA

DEGRADASI LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI SULAWESI TENGGERA

Artikel ini membahas mengenai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara, dengan degradasi lingkungan yang tidak boleh meningkat dari waktu ke waktu dan sebaliknya menurun. Industri pertambangan merupakan penyumbang kedua terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara. Namun sejalan dengan itu terjadi pula degradasi lingkungan sebagai dampak dari proses pertambangan di beberapa daerah. Hasil dari studi literatur pada penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah perlu mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan degradasi lingkungan akibat dampak dari pertambangan di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Reklamasi bekas lahan tambang merupakan kebijakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mengatasi degradasi lingkungan akibat dampak dari kegiatan tambang yang dilakukan tanpa mengindahkan proses pertambangan sudah berjalan dengan tepat ataupun tidak sehingga dapat meminimalisir dampak dari degradasi lingkungan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Kata Kunci : Degradasi Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Pertambangan